

MENINGKATKAN KAPABILITAS MASYARAKAT MELALUI PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAMPUNG KOTA DI YOGYAKARTA

Oleh :

Paulus Bawole

(Jurusan Arsitektur, Fakultas Arsitektur & Desain, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, paulus@staff.ukdw.ac.id)

Abstrak

Pertumbuhan daerah kumuh di dunia masih menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak negara. Selain itu perkampungan kumuh juga menjadi sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG 2030. Di dalam kawasan kumuh tidak hanya ada penduduk miskin yang termasuk golongan menengah ke bawah, tetapi kualitas lingkungan sekitarnya juga buruk. Seringkali masyarakat luar berpendapat bahwa orang miskin tidak dapat melakukan pembangunan, karena mereka tidak memiliki informasi yang cukup, orang miskin dan tingkat pendidikan mereka rendah. Banyak program pemerintah berusaha mengentaskan kemiskinan dan melaksanakan program pengembangan kampung perkotaan untuk menghilangkan permukiman kumuh. Melalui program-program ini, diharapkan akan ada peningkatan kemampuan masyarakat terpinggirkan yang tinggal di kampung-kampung perkotaan. Artikel ini membahas bagaimana kemampuan kaum miskin dalam hal pembangunan permukiman dapat ditingkatkan melalui proses pengembangan infrastruktur infrastruktur partisipatif secara partisipatif yang diprakarsai oleh pemerintah melalui program pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : Miskin, kampung kota, Infrastruktur, perkotaan, keberlanjutan

I. PENDAHULUAN

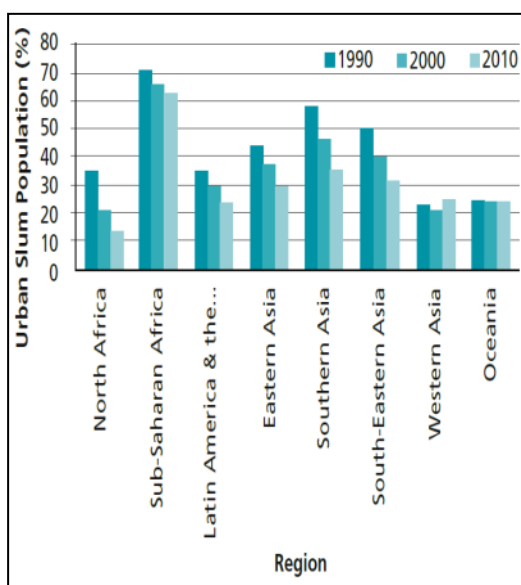
Munculnya permukiman kumuh di kota telah menjadi fenomena bentuk fisik dari terjadinya urbanisasi secara spontan. Suatu fenomena yang saat ini telah terbukti menjadi perhatian dan terus-menerus menjadi tantangan besar bagi para praktisi perkotaan dan pembuat kebijakan. Selama lebih dari 50 tahun terakhir, pemerintah telah menerapkan berbagai program, menargetkan kawasan kumuh dengan hasil yang beragam, tetapi upaya tersebut sampai saat ini belum cukup untuk mengantisipasi bertumbuhnya kawasan kumuh dan mempersatukan elemen-elemen kota menuju pola pertumbuhan perkotaan yang terencana.

Menurut data yang didapatkan dari UN-Habitat, 220 juta orang telah dibebaskan dari kondisi kumuh selama dekade 2000-2010. Selain itu, selama sepuluh tahun tersebut, proporsi populasi perkotaan yang tinggal di daerah kumuh di negara berkembang telah

menurun dari 39% pada tahun 2000 menjadi sekitar 32% pada tahun 2010. Meskipun ada peningkatan kualitas kumuh, populasi yang hidup dalam kondisi termarginalkan ini kemungkinan akan tumbuh dengan enam juta setiap tahun, untuk mencapai total 889 juta pada tahun 2020. Dengan kata lain pola pertumbuhan permukiman kumuh akan terus menjadi masalah di kota-kota pada abad ke-21 ini. Untuk menangani permukiman kumuh dan memanfaatkan perkembangan urbanisasi menjadi pembangunan berkelanjutan, diperlukan strategi yang dapat melengkapi kota dengan alat dan peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat mengantisipasi pertumbuhan perkotaan yang sporadis.

Seiring dengan perkembangan kota arus urbanisasi juga semakin meningkat pada kota-kota di negara berkembang. Arus migrasi ke kota ini menyebabkan kebutuhan akan fasilitas infrastruktur semakin bertambah. Bagi pada

migrant yang mempunyai cukup modal kapital dan /atau skill mereka tidak mempunyai masalah dengan tempat tinggal, Sebaliknya bagi mereka yang tidak mempunyai skill maupun modal kapita yang cukup, mereka tidak mampu membeli atau menyewa rumah pada pasar formal. Akibatnya mereka akan mencari lokasi sewa yang paling murah atau mencari lahan gratis pada Kawasan padat dan lahan-lahan kosong yang tidak layak dimanfaatkan sebagai rumah tinggal. (Bawole, 2015) Lokasi yang paling murah untuk ditempati adalah Kawasan kampung kota atau lahan-lahan kosong yang ditempati masyarakat miskin secara illegal. Perkembangan permukiman kumuh di dunia masih tetap menjadi problem yang dihadapi dan menjadi target SDG 2030. Grafik 1 menunjukkan penurunan pertumbuhan permukiman kumuh secara global di Asia Tenggara mulai tahun 1990 -2010. [Grafik 1]



Grafik 1. Perkembangan Populasi Permukiman Kumuh Secara Global Antara Tahun 1990 – 2010

Note : Angka Tahun 2010 Merupakan Prediksi dari UN Habitat
Source : UN Habitat, 2014. *Practical Guide to Designing, Planning and Implementing Citywide Slum Upgrading Programs*

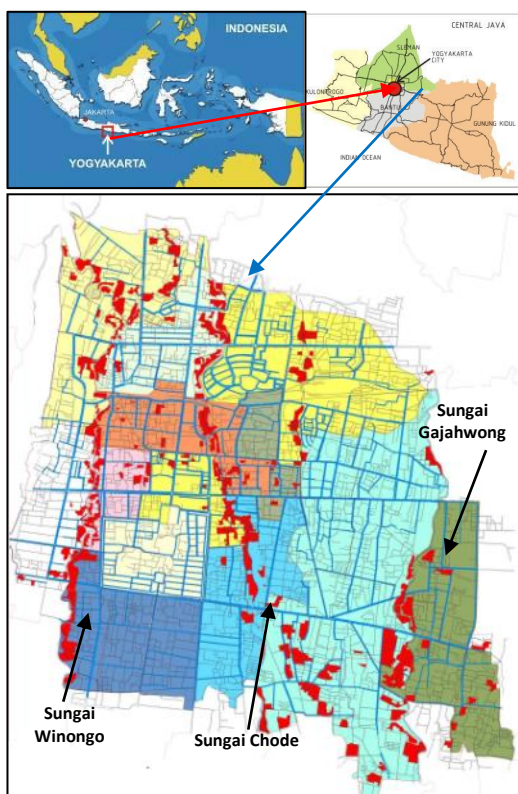
Pada Kawasan permukiman informal, masyarakat miskin pertama kali mengembangkan rumah mereka dari bahan yang sangat sederhana seperti potongan karton, plastik, bambu atau kayu-kayu bekas. Dalam periode waktu tertentu kawasan permukiman tersebut berkembang secara spontan. Karena kualitas lingkungan di Kawasan ini sangat buruk, pemerintah sering kali melaksanakan program penggusuran dan memindahkan penduduk tergusur ke daerah lain bagi yang punya KTP kota setempat dan mengusir mereka pulang ke daerah asalnya. Kadang-kadang jika orang menolak untuk pindah, pemerintah memaksa mereka dengan membakar atau membombardir permukiman. (ACHS, 2003)

Pada semua permukiman informal, penghuninya hidup tanpa memiliki sertifikat tanah yang sah dan izin bangunan untuk rumah mereka. Namun demikian ada banyak keluarga, yang membayar retribusi kepada pemerintah daerah sehubungan dengan kehidupan mereka di daerah pemerintah daerah. Oleh karena itu mereka keberatan dan tidak setuju, jika pemerintah atau lembaga lain mengatakan bahwa mereka tinggal secara illegal di daerah yang kosong di dalam kota, karena sebenarnya pemerintah daerah tahu bahwa orang miskin dan permukiman informalnya ada di beberapa bagian kota mereka. Hal ini dibuktikan dengan adanya retribusi yang ditarik oleh oknum pemerintah lokal.

Perkembangan kampung kota yang diberstatus kumuh di kota Yogyakarta pada tahun 2016 tercatat mencapai luasan sebesar 264,90 Ha terdiri dari 13 Kecamatan dan 36 Kelurahan. Wilayah Kampung kota yang dinyatakan kumuh tersebut kebanyakan

berkembang di sepanjang 3 sugai besar yang melintasi kota Yogyakarta: sungai Winongo, Sungai Chode dan Sungai Gajahwong. [Lihat Gambar 1] Di sepanjang ketiga sungai tersebut masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah mengembangkan permukiman mereka secara spontan. [Lihat Gambar 2] Pada beberapa wilayah kampung kota di kota Yogyakarta pemerintah daerah sudah melaksanakan program upgrading dengan dukungan dana pinjaman lunak dari Bank Dunia. Program-program tersebut diinisiasi oleh Dirjend Cipta Karya, Kementerian PUPR dan dilaksanakan langsung oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dibawah dampingan Fasilitator di lingkungan Kordinator Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pengamatan di lapangan ada dua cara implementasi perbaikan kampung kota yang dilakukan di kota Yogyakarta, walaupun dalam proses perencanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan dampingan fasilitator program.



Gambar 1. Perkembangan Permukiman Kumuh di Sepanjang bantaran Sungai Winongo, Chode dan Gajahwong
Sumber : Dokumentasi Kordinator Kota Program KOTAKU di Kota Yogyakarta – DIY, tahun 2016



Gambar 2. Perkembangan kampung Kumuh di Bantaran Sungai Chode di Kelurahan Suryatmajan - Yogyakarta. Sebelum Program Perbaikan Dilaksanakan
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Yang pertama proses pelaksanaan rencananya dilakukan oleh pihak ketiga atau konsultan dan kontraktor. Biasanya pagu dana yang diberikan cukup besar, sehingga masyarakat kurang bisa dipercaya oleh pihak pemerintah daerah maupun pusat untuk mengimplementasikan perencanaan yang sudah dibuat. Untuk pagu dana yang lebih kecil, masyarakat diberi kepercayaan melakukan implementasi pekerjaan

fisik dengan didampingi oleh Tenaga Ahli fasilitator program. Berdasarkan observasi di lapangan, proses transfer of knowledge akan dapat dilakukan dengan baik, apabila masyarakat setempat dilibatkan mulai dari awal perencanaan sampai implementasi pekerjaan fisiknya.

Peningkatan kapabilitas masyarakat setelah proses pembangunan fasilitas infrastruktur dapat terlihat dalam proses pemeliharaan dan pengembangan fasilitas yang sudah dibangun. Selain itu kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk peningkatan ekonomi penduduk setempat yang berpenghasilan rendah dapat terlihat secara bertahap. Dalam diskusi selanjutnya akan banyak dibahas bagaimana proses pembangunan infrastruktur kampung kota dapat meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam bermukim di kampung kota. Penelitian dan pengamatan yang sudah dilakukan dalam waktu yang cukup lama dapat menunjukkan potensi yang besar dari masyarakat marjinal untuk berkembang apabila diberi kesempatan untuk berkembang. [Mund, 2008]

II. DISKUSI LANDASAN TEORI

Pada tahun 1948 PBB mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dengan deklarasi tersebut PBB berharap situasi dunia termasuk hak asasi manusia dapat ditingkatkan dengan sangat baik. Pada kenyataannya saat ini ada banyak masalah dengan Hak Asasi Manusia yang diciptakan oleh pemerintah, lembaga, atau bahkan oleh individu. Situasi terburuk yang terjadi adalah persentase kemiskinan di dunia meningkat pesat. Untuk memerangi peningkatan kemiskinan di dunia, PBB mendeklarasikan

Deklarasi Milenium PBB pada tahun 2000 dan realisasinya di deklarasikan dalam bentuk Millenium Development Goals 2015. Karena target MDG 2015 masih belum bisa tuntas dicapai, maka target tersebut dilanjutkan dalam target Sustainable Development Goals 2030 (SDG 2010) dengan beberapa penajaman yang harus dicapai untuk mengentaskan kemiskinan.

Goal atau tujuan pertama dari SDG 2030 adalah menghilangkan semua bentuk kemiskinan di seluruh dunia. Pada pasal 1.3 jelas dituliskan bahwa pada tahun 2030 bisa dipastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya yang miskin dan yang rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber ekonomi, serta akses ke infrastruktur dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang sesuai, dan layanan keuangan termasuk mikro-ekonomi. Dengan target SDG 2030 ini semua negara di dunia termasuk Indonesia berusaha memerangi kemiskinan di negara masing-masing.

Terbatasnya ruang, hambatan kemacetan Lalu Lintas, kebisingan, polusi, risiko kecelakaan, dan kondisi yang umumnya sangat mengurangi kenyamanan adalah ciri khas situasi yang dirasakan penduduk kota pada sebagian besar kota di dunia. Perkembangan situasi sebagai bentuk pemenuhan fasilitas transportasi tidak hanya mengurangi peluang pejalan kaki untuk memanfaatkan ruang publik, tetapi juga telah menempatkan fungsi sosial dan budaya ruang kota menjadi terkepung dengan tingginya arus lalu lintas. Fungsi tradisional ruang kota sebagai tempat pertemuan dan interaksi sosial menjadi berkurang. (Gehl, 2010)

Di negara-negara berkembang, kebutuhan ruang untuk kegiatan manusia jauh lebih kompleks dan serius. Sebagian besar penduduk terpaksa menggunakan ruang kota secara intensif untuk banyak kegiatan sehari-hari. Secara tradisional ruang kota telah berperan cukup baik dalam beberapa penggunaannya, tetapi ketika lalu lintas mobil, misalnya, tumbuh dengan cepat, persaingan untuk ruang kota semakin meningkat. Perkembangan kehidupan kota dengan pejalan kakinya menjadi semakin tidak bermartabat dari tahun ke tahun. Kota-kota telah berkembang pesat, dan pertumbuhan kota akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Kota-kota baru dan yang sudah ada harus membuat perubahan penting dengan asumsi untuk perencanaan dan penentuan prioritas. Pemikiran dengan fokus lebih besar diberikan kepada kebutuhan orang-orang yang menggunakan kota harus menjadi tujuan utama untuk perencanaan dan perancangan kota masa depan.

Pertumbuhan kota secara otomatis mempengaruhi pengembangan spasial dari ruang-ruang yang ada di dalam kota termasuk bentuk spasial dari permukiman spontan yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagian besar pemukiman spontan memiliki fasilitas infrastruktur yang minimal. Pemukiman informal merupakan sebutan lain dari squatter settlement yang dapat didefinisikan sebagai suatu areal permukiman di suatu kota yang dihuni oleh masyarakat yang sangat miskin yang tidak mempunyai kepemilikan lahan yang legal. Oleh sebab itu mereka menempati lahan-lahan kosong ditengah kota baik yang berupa lahan privat maupun lahan umum.(Srinivas, 2005) Di permukiman masyarakat

berpenghasilan rendah ini mereka membangun rumah sederhana dengan bahan bangunan yang sederhana juga. Karena orang-orang di lingkungan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah secara sosial terpinggirkan oleh masyarakat yang tinggal di luar, maka seringkali bentuk Arsitektur yang mereka bangun disebut dengan Arsitektur Marjinal. Masyarakat miskin ini memang menyadari buruknya kualitas lingkungan tempat tinggal mereka, tetapi mereka sendiri tidak bisa mengatakan bahwa pemukiman yang mereka tinggali adalah pemukiman buruk yang tidak layak dijadikan tempat tinggal karena mereka tidak punya alternatif pemukiman lain yang dapat dipakai sebagai tempat tinggal akibat kemiskinan yang mereka alami.(Kersting, 1996)

Dengan keadaan perkembangan daerah slum beserta dengan penduduk miskinnya, focus utama dalam pemecahan masalah di atas bukan pada peningkatan bantuan atau pembebasan hutang atau strategi mereduksi angka kemiskinan pada tingkat nasional, melainkan pada perubahan-perubahan strategi tingkat lokal daerah yang mempunyai banyak daerah slum atau squatter settlements.(Hasan, dkk., 2005) Hardoy dalam bukunya yang berjudul „Squatter Settlement“ mengatakan bahwa masyarakat miskin mendemonstrasikan kecerdikannya yang besar dalam mengembangkan lingkungan perumahan mereka yang baru dan dalam mengorganisasikan konstruksi perumahan, walaupun pemerintah menghargai mereka sebagai ilegal. Cara mereka, perencanaan mereka, perancangan mereka dan bahan bangunan yang mereka pergunakan sering kali

jauh lebih sesuai dengan kebutuhan lokal mereka, income lokal mereka, keadaan iklim lokal di sekitar mereka, dan bahan dasar lokal mereka dari pada standard-standard legal dan official yang disyaratkan oleh pemerintah. (Hardoy and Satterthwaite, 1989)



Gambar 3. Proyek Slum Upgrading di Parada Brazilia yang Cukup Berhasil Penanganannya

Sumber: *UN Habitat, 2014*

Dalam menangani masalah pemukiman masyarakat miskin, biasanya orang-orang yang mencoba memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berusaha melibatkan penduduk miskin setempat dalam melakukan proses perencanaan dan perancangan pemukiman mereka. Metode partisipasi masyarakat secara aktif [*Active Community Participation*] adalah kunci pembangunan yang dipercayakan pada masyarakat sendiri. (Reid, 2000) Proram perbaikan permukiman kumuh yang dilakukan secara partisipatoris sudah

banyak dilaksanakan di kota-kota besar Negara-negara Asia, Afrika dan Latin Amerika. Salah satu contoh pelaksanaan Slum Upgrading dilaksanakan di Brazilia tepatnya di kota Parada Lucas. Sebelum dilaksanakan program upgrading kondisi permukiman kumuh berkembang disepanjang tepi sungai secara sporadis. Tepi sungai terlihat kumuh dengan tumbuhnya berbagai vegetasi yang sama sekali tidak tertata dengan baik. Melihat perkembangan kota Parada Lucas yang sudah dilaksanakan program Upgrading, Kualitas lingkungan permukiman yang sudah tertata dengan baik dapat dilihat pada Gambar 3

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dan cara pengambilan data dilakukan secara Snow Ball Sampling.

Teknik atau strategi pelaksanaan yang tergabung dalam desain penelitian meliputi:

- Wawancara mendalam
- Wawancara informan kunci
- Pengamatan partisipan dan non-partisipan
- Analisis konten kebijakan sekolah, piagam dan dokumen kurikulum
- Analisis artefak

Data awal yang diobservasi jumlahnya relatif kecil dua lokasi masing-masing Kelurahan Karangwaru dan Kelurahan Suryatmajan. Kemudian dalam periode tertentu sampel-sampel lain ditambahkan sehingga jumlahnya menjadi significant. Kelurahan lain yang menjadi pengamatan adalah Kelurahan Ngampilan, Gowongan dan Keparakan. Semua wilayah Kelurahan yang diambil menjadi sampel penelitian adalah Kelurahan yang

mendapatkan program PLPBK. Penelitian dilakukan dalam periode waktu kurang lebih satu tahun selama program mulai dilaksanakandalam tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan fisik.

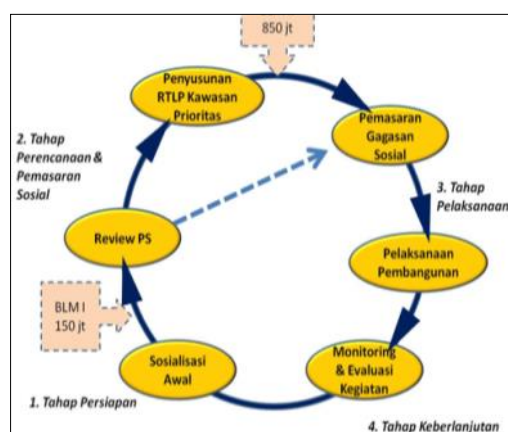
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bukan merupakan data numerik yang bisa dihitung secara statistik, melainkan data non numerik berupa informasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan dampingan fasilitator kelurahan. Melalui proses kegiatan yang dilakukan tahap demi tahap,dapat terlihat seberapa jauh keterlibatan masyarakat dan seberapa banyak transfer of knowledge terjadi dalam proses pelaksanaan program PLPBK.

Proses Pelaksanaan Program PLPBK

Pada diskusi sebelumnya dijelaskan bahwa implementasi program KOTAKU dilaksanakan di wilayah Kelurahan yang ada di dalam kota-kota di wilayah Kabupaten dan Kotamadya yang sudah dipilih berdasarkan kumuh. Tujuan utama dari program ini adalah melakukan pemberdayaan masyarakat (transfer of knowledge) yang dikemas dalam bentuk program pembangunan fasilitas infrastruktur yang berdampak pada pengurangan wilayah kumuh suatu kota. Proses PLPBK dimulai dari Persiapan, Perencanaan dan Pemasaran Sosial, Implementasi sampai dengan proses Keberlanjutan dapat dijelaskan seperti pada Gambar 4.

Proses PLPBK diawali dengan memberikan pelatihan-pelatihan pada fasilitator yang akan mendampingi masyarakat dalam membuat perencanaan permukiman yang akan mengurangi wilayah kumuh. Setelah itu proses Pemetaan Sawadaya dilakukan bersama-sama

dengan anggota masyarakat. Pada melakukan pemetaan swadaya mereka akan berusaha mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada pada wilayah yang dirancang sekaligus mengidentifikasi kehidupan masyarakat. Untuk memvalidasi hasil pemetaan swadaya hasil pemetaan dicross check langsung dengan masyarakat melalui workshop secara bersama-sama.



Gambar 4. Siklus Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

Sumber: Paparan Djjrnd Cipta Karya, 2014

Setelah melakukan validasi melalui workshop hasil pemetaan swadaya dimanfaatkan untuk membuat perencanaan kawasan permukiman di wilayah Kelurahan. Pada proses inilah *transfer of knowledge* mulai dilakukan secara intensif. Setelah pelaksanaan pembangunan infrastruktur selesai, tahap berikutnya adalah tahap monitoring dan evaluasi hasil kerja yang sudah dilakukan. Selain itu pada tahap ini masyarakat diharapkan sudah mampu membuat perencanaan ke depan sesuai dengan mimpi yang mereka idam-idamkan. Dengan demikian program pemberdayaan yang dilakukan melalui program PLPBK yang saat ini dilanjutkan dengan

proram Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

IV. HASIL PENELITIAN

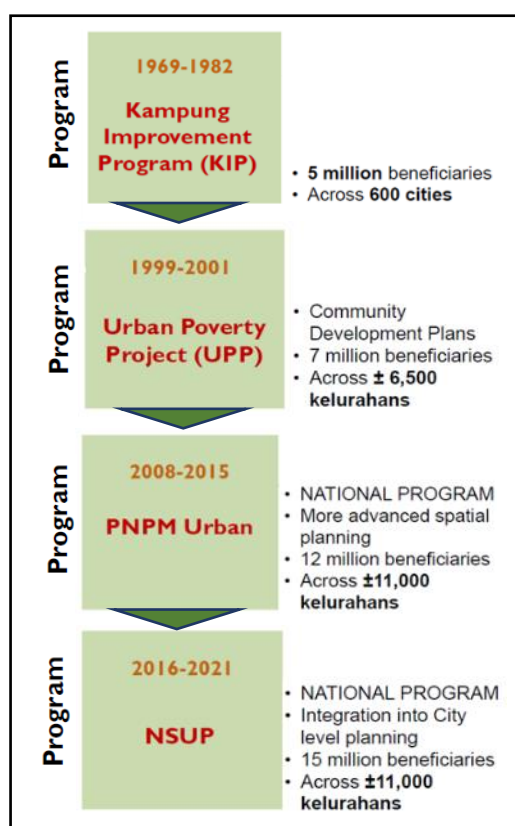
Pemahaman yang sempit tentang proses peningkatan kualitas permukiman kumuh adalah hanya mengacu pada perbaikan perumahan dan / atau infrastruktur dasar di daerah kumuh. Dalam arti yang lebih luas, peningkatan kualitas permukiman juga mencakup proses peningkatan ekonomi dan sosial yang dapat menghasilkan perbaikan fisik rumah dan fasilitas infrastrukturnya.

Pelajaran utama yang dapat diambil dari pemahaman di atas diantaranya adalah perlunya partisipasi masyarakat bukan hanya dalam proses pelaksanaan perbaikan kawasan permukiman kumuh, melainkan juga dalam proses pengambilan keputusan perencanaan dan desain yang menetapkan prioritas pelaksanaan pembangunan dan dukungan terhadap implementasinya.

Dengan demikian peningkatan kualitas permukiman kumuh berarti memberikan peran yang jauh lebih besar bagi masyarakat dalam proyek dan program dalam bentuk pelatihan, bantuan organisasi, bantuan keuangan dan saran manajerial. Dukungan ini dapat diberikan oleh pemerintah tetapi dalam banyak kasus masih ada kendala terutama terkait dengan time frame yang harus menyelesaikan pekerjaan dan menuntaskan dana yang sudah diajukan dalam periode waktu tertentu.

Secara umum proses peningkatan kualitas permukiman kumuh yang juga mengurangi kemiskinan perkotaan sudah dilakukan dalam beberapa periode di Indonesia. Pada Gambar 5 dijelaskan tentang program-

program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan pemerintah sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia bahkan sebenarnya sudah dilakukan sejak jaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1969 – 1982 dilaksanakan program Kampung Improvement Program (KIP) yang orientasinya pada program perbaikan infrastruktur di permukiman kampung kota dengan kepemilikan lahan yang legal. Pelaksanaan program ini memperbaiki kawasan kumuh pada kurang lebih 500 kota dan mengentaskan sekitar 5 juta penerima manfaat.



Gambar 5. Program – program Pengembangan Kawasan Kumuh Kota yang dilaksanakan pada Periode tahun 1969 - 2021

Sumber : Paparan Pelaksana Program KOTAKU pada Tahun 2017

Program perbaikan kawasan kumuh kota paska program KIP dilakukan secara berturut-turut dengan program Urban Poverty Project

atau dikenal dengan nama Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam periode tahun 1999 – 2000. Program tersebut dilanjutkan dengan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan yang diakhiri dengan program Penataan Permukiman berbasis Komunitas (PLPBK). Setelah itu program terakhir yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan adalah Neighborhood Slum Upgrading Program atau dikenal dengan nama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Secara umum pelaksanaan program KOTAKU bisa dikatakan sebagai program kelanjutan dari program PLPBK yang sudah ditutup programnya pada tahun 2015. Tujuan utama dari program KOTAKU tidak jauh berbeda dari program-program yang dilaksanakan sebelumnya yaitu Pemberdayaan Masyarakat. Pada program KOTAKU ini juga diharapkan akan terjadi Transfer of Knowledge dari fasilitator pendamping ke masyarakat melalui BKM.

Program Upgrading Kawasan Kumuh di Yogyakarta

Program perbaikan kawasan kumuh di Yogyakarta yang dijadikan obyek pengamatan secara detail adalah program PNPM Perkotaan yang direncanakan sejak tahun 2009 dan diimplementasikan pada tahun 2011. Program tersebut adalah Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas atau disingkat PLPBK. Program ini dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan didampingi oleh Fasilitator Kelurahan dan dua Tenaga Ahli, masing-masing TA Sosial Kemasyarakatan dan TA Teknik. Salah satu

pilot project program ini dilaksanakan di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo.

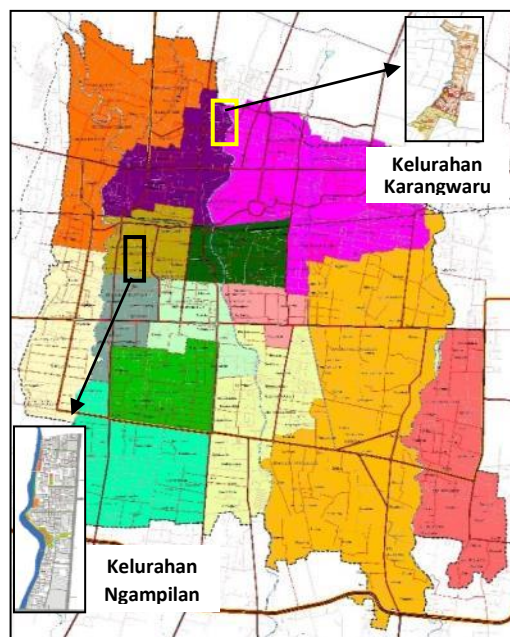
Program PLPBK merupakan suatu program penataan lingkungan permukiman berbasis partisipasi masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk merencanakan pengembangan lingkungan permukiman pada waktu mendatang. Strategi partisipasi masyarakat merupakan utama bagian dari kegiatan PLPBK yang fokusnya pada proses penyusunan rencana pengembangan lingkungan permukiman. Dalam proses partisipatif tersebut Lembaga yang terlibat secara aktif selain Masyarakat adalah BKM dan Unit-unit Pengelolaannya, Pokja-pokja PLPBK, Perangkat Kelurahan, Tim Teknis Pemkot untuk PLPBK, Tim Inti Perencanaan Partisipatif, yang didukung oleh PJOK Kecamatan, TKPKD dan TKPP Kota, Tim Konsultan Pendamping (Korkot, KMW dan KMP), Kelompok pemerhati dan pemangku kepentingan lainnya.

Perencanaan partisipatif ini meliputi perencanaan makro (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang meliputi seluruh kawasan Kelurahan dimana didalamnya akan digali visi dan misi seoptimal mungkin untuk kemudian dikembangkan menjadi strategi pengembangan wilayah. Program ini juga berusaha menemukan potensi dan permasalahan yang dihadapi yang kemudian dapat dianalisa untuk menentukan kawasan prioritas terpilih. Pengembangan kawasan terpilih tersebut nantinya akan didanai oleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari program PLPBK. Sedangkan perencanaan mikro Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) lebih pada menjabarkan visi dan tema kawasan yang ditetapkan ke dalam tata ruang spasial

yang lebih kecil, kemudian ditindak lanjuti dengan menyusun agenda aksi implementasi yang dilengkapi dengan estimasi biaya dan kelengkapan teknis.

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman pada intinya, berisi tentang rencana alokasi pemanfaatan ruang, rencana pengembangan kegiatan ekonomi, rencana pengembangan infrastruktur yang meliputi jaringan jalan dan jembatan, saluran drainase, rencana pengembangan air bersih dan sanitasi, rencana pengembangan pengolahan sampah serta rencana peningkatan pelayanan sosial/pelayanan publik dan rencana pengembangan kelembagaan pengelolaan pembangunan kelurahan. Semua rencana yang dibuat Bersama dengan masyarakat tersebut diharapkan menjadi pembelajaran yang berharga bagi masyarakat untuk semakin meningkatkan kapabilitas mereka mengenai permukiman yang akrab terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

Keadaan ini mencerminkan pendekatan baru dan inovatif untuk perencanaan dan pengembangan perkotaan yang melibatkan lebih banyak warga secara langsung, inklusif dan berpihak pada kaum miskin. Dengan melibatkan masyarakat di seluruh proses perencanaan kota dan merancang tujuan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dapat dicapai dengan mudah, karena orang-orang di daerah sasaran tahu persis apa masalah, kebutuhan dan kemampuan mereka untuk meningkatkan lingkungan hidup mereka. Sebagai studi kasus yang dibahas pada penelitian ini dipilih program PLPBK yang diimplementasikan di Kelurahan Karangwaru dan Kelurahan Ngampilan [lihat Gambar 6]



Gambar 6. Studi Kasus yang Dipilih di Wilayah Kotamadya Yogyakarta, masing-masing Kelurahan Karangwaru dan Kelurahan Ngampilan

Sumber : Laporan RPLP BKM Kelurahan Karangwaru & Ngampilan

Study Kasus di Kelurahan Karangwaru

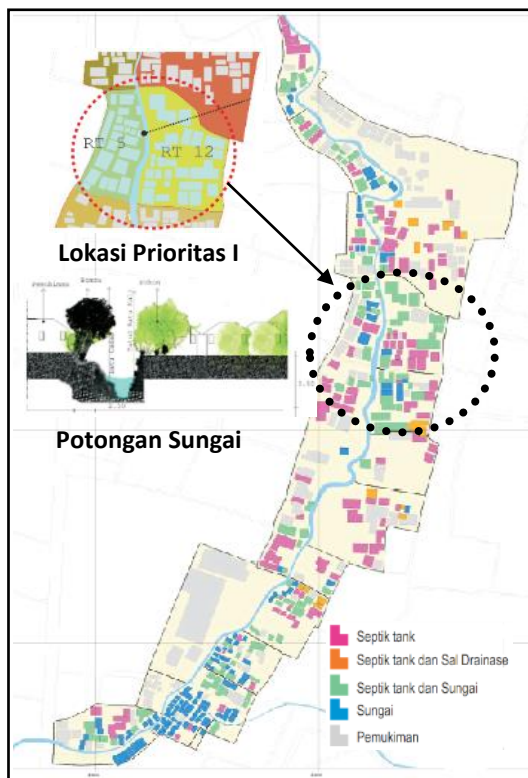
Luas Kelurahan Karangwaru yaitu 71,96 Ha, rencana pola pemanfaatan lahan Kelurahan Karangwaru tidak lepas dari Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta tahun 2010 yang telah di perdakan sesuai dengan Perda No.02 tahun 2010. Perencanaan berupa penataan sungai dengan pembuatan sabuk Hijau / green belt yang bermanfaat membatasi laju pertumbuhan permukiman, sebagai penjaga habitat sungai, sebagai pelindung dari erosiserta longsor , kawasan konservasi dan penambah estetika kawasan.

Kawasan budidaya direncanakan seluas 70,152 Ha (96,49 %). Fungsi tertinggi dimanfaatkan untuk kawasan permukiman sebesar 38.40 Ha (52.65 %). Kawasan permukiman meliputi permukiman swadaya dan permukiman terencana/perumahan. Ruang terbuka hijau tidak hanya memiliki fungsi

ekologis (perlindungan dan pelestarian), tetapi juga memiliki fungsi sosial ekonomi budaya (arsitektural, produktif dan budidaya) dan fungsi pengamanan sarana dan prasarana secara fisik. Strategi pengembangan kawasan hijau yaitu dengan penataan halaman/ pekarangan rumah yang masih memungkinkan untuk tamanisasi dan penghijauan.

Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki prospek yang bagus dan berpotensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Ada beberapa produk lokal yang mampu menembus pasar nasional. Home industri yang ada saat ini perlu pembinaan baik secara manajemen pemasaran ataupun keuangan. Perlu adanya rencana pengembangan diversifikasi produk yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengembangan wisata yang berorientasi pada potensi alam yang di miliki Kelurahan Karangwaru. Akan sangat mendukung pengembangan wilayah Karangwaru. Potensi - potensi alam yang bisa dikembangkan meliputi alam Sungai Buntung, Sungai code dan alam pertanian daerah petinggen. Untuk pengembangan kawasan wisata perlu adanya peran masyarakat dan lingkungan, sehingga kawasan wisata ini akan terwujud dan dan meningkatkan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.



Gambar 7. Lokasi Perencanaan Program PLPBK di Kelurahan Karangwaru dengan Prioritas Pertamanya

Sumber: Laporan RPLP BKM Kelurahan Karangwaru



Gambar 8. Photo Dokumentasi Before dan After Implementasi Program PLPBK di Kawrangwaru

Sumber: Laporan RPLP BKM Kelurahan Karangwaru

Semua proses perencanaan di atas dilaksanakan bersama partisipasi masyarakat. Berdasarkan pengamatan di lapangan, hampir semua pengurus BKM Karangwaru memahami

proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang harus dilakukan. Dengan demikian BKM dengan segala unsurnya mejadi penggerak kegiatan yang meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam hal tinggal pada permukiman yang akrab terhadap lingkungan berkelanjutan. Selain itu pada beberapa bagian dari kawasan yang dikembangkan terlihat kreativitas masyarakat yang berusaha meningkatkan perekonomian dengan membuka kios dan warung kecil pada jalan yang menjadi orientasi permukiman. Gambar 7 menunjukkan perubahan kualitas lingkungan sebelum dan sesudah program PLPBK diimplementasikan di Kelurahan Karangwaru.

Study Kasus di Kelurahan Ngampilan

Kelurahan Ngampilan merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administrasi Kota Yogyakarta, Kecamatan Ngampilan dimana lokasi Kelurahan Ngampilan lebih didominasi sebagai wilayah permukiman, perkantoran dan pertokoan. Kelurahan Ngampilan terdiri dari 13 RW dan terbagi menjadi 70 RT.

Luas Kawasan prioritas Kelurahan Ngampilan adalah sebesar 74.549,76 m² atau 7,45 Ha dengan RW 1 seluas 3,52 Ha dan RW 2 seluas 3,93 Ha.

Dalam rencana pola penggunaan lahan kawasan prioritas, kawasan sekitar sungai dijadikan sebagai kawasan perlindungan yang pemanfaatannya terbatas dan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Pemanfaatan lahan sekitar sungai diharapkan tidak mengurangi debit air yang ada.

Di Kampung Ngampilan memiliki beberapa mata air, baik yang sudah

dimanfaatkan secara maksimal maupun belum. Kawasan mata air tersebut diarahkan untuk menjadi kawasan perlindungan setempat guna menjaga kelestarian mata air tersebut dan tetap menjaga debit air yang ada. Ruang Terbuka Hijau yang saat ini berupa gundukan sampah, ruang terbuka dan tanah lapang dengan luas yang signifikan dapat difungsikan sebagai taman dan ditetapkan sebagai kawasan lindung Kelurahan Ngampilan.



Gambar 9. Lokasi Perencanaan Program PLPBK di Kelurahan Ngampilan, Y

Sumber : Laporan RPLP BKM Kelurahan Karangwaru Tahun

Kawasan peruntukan permukiman tersebar secara merata di RW 1 dan 2. Perkembangan permukiman Kawasan prioritas diarahkan menggunakan metode kampung deret mengingat padatnya permukiman saat ini. Rencana sebaran lokasi permukiman Kawasan Prioritas merupakan permukiman saat ini dan alokasi perkembangan perumahan permukiman baru ke wilayah sekitarnya. Rencana Aturan Dasar Bangunan kawasan prioritas ditetapkan melalui berbagai aturan terkait jarak antar bangunan, orientasi bangunan, Garis Sempadan Bangunan, Tapak Bangunan, dan Koefisien

Lantai bangunan. Kawasan Prioritas masih banyak terdapat Rumah Tidak Layak Huni. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut akan dilakukan rehabilitasi menjadi Rumah Sederhana Sehat.

Pekarangan rumah di Kawasan prioritas belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya pekarangan yang tidak terurus dan menjadikan lingkungan permukiman nampak kumuh. Untuk menciptakan lingkungan permukiman yang tertata dan mendukung pengembangan potensi ketahanan pangan, maka pekarangan milik warga diarahkan untuk dikembangkan menjadi lahan produktif pertanian pekarangan rumah.

Permukiman kumuh Kawasan prioritas direncanakan dengan konsep upgrading. Penanganan permukiman kumuh dilaksanakan dengan meningkatkan kondisi lingkungan permukiman kumuh melalui perbaikan-perbaikan infrastruktur serta mempercantik kawasan tersebut. Pengembangan permukiman di Kawasan prioritas akan tetap memperhatikan dan menggunakan elemen khas dan potensi kawasan (budaya lokal) untuk memperkuat karakter kawasan sebagai kawasan permukiman yang tumbuh secara teratur tertata (organis) dan membentuk permukiman yang harmonis.

Proses transfer of knowledge pada wilayah Kelurahan Ngampilan tidak jauh berbeda dengan di Karangwaru; Perbedaan yang terjadi pada Kelurahan Ngampilan adalah keberanian warga untuk menciptakan ruang terbuka public dengan merelokasi rumah dibawah dipindah ke lantai dua rumah di belakangnya. Dengan relokasi ini masyarakat mendapatkan ruang terbuka public yang saat ini aktif dipakai masyarakat untuk kegiatan sehari-hari, terutama anak-anak yang sering bermain di

ruang terbuka ini. Konsep kearifan local yang diterapkan di kampung tepi sungai Winongo ini dikenal dengan nama M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali = Mundur, Naik, Menghadap ke Kali). Dengan konsep tersebut masyarakat yang tadinya tidak mempunyai ruang terbuka, sekarang mereka bias menikmati kenyamanan ruang terbuka yang ada.



Gambar 10. Lokasi Perencanaan Program PLPBK di Kelurahan Ngampilan dengan Prioritas Utama Relokasi Rumah

Sumber : Laporan RPLP BKM Kelurahan Karangwaru

Perkembangan Kampung Kota di Yogyakarta saat ini pada umumnya tetap mempertahankan konsep pengembangan

infrastruktur permukiman dengan upgrading dan berorientasi pada Kearifan Loka M3K. Sedangkan peningkatan kapabilitas masyarakat akan bias terjadi apabila proses perencanaan PLPBK diikuti dengan tekun oleh BKM dan masyarakat mulai dari awal sosialisasi, perencanaan, implementasi sampai dengan pelaksanaan peeliharaan proyek yang sudah dibangun. Berdasarkan pengamatan dilapangan, aspek yang menjadi hambatan dalam proses transfer of knowledge pada masyarakat adalah periode waktu (*time frame*). Proses pemberdayaan memang perlu waktu yang agak Panjang, karena kita melakukan proses pemintaran masyarakat. Pada umumnya proyek yang diberikan oleh pemerintah pusat mempunyai waktu yang tidak Panjang, sehingga apabila pekerja dikejar waktu untuk segera selesai, biasanya fasilitator intervensi terlalu besar untuk segera menyelesaikan program. Akhirnya masyarakat hanya terima jadi saja dan transfer of knowledge tidak akan pernah terjadi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari diskusi dalam artikel ini beberapa kesimpulan dapat diambil dan dijelaskan seperti berikut:

- Metode Pemberdayaan Masyarakat melalui Proses Pembangunan Infrastruktur yang diprakarsai oleh beberapa institusi dapat memotivasi masyarakat untuk hidup di lingkungan permukiman yang lebih sehat dan berkelanjutan.
- Kekuatan proses kolaborasi pemangku kepetingan dalam memberdayakan masyarakat dapat menstimulan proses peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan masyarakat

- perubahan karakter dalam kehidupan sehari-hari mereka terutama terkait dengan menjaga kualitas lingkungan di sekitar permukiman mereka dapat ditingkatkan apabila mereka dilibatkan sejak awal.
- pengetahuan masyarakat terutama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Kemandirian Masyarakat Kecamatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan = LKMK tentang perencanaan dan implementasi penataan kampung kota akan meningkat setelah transfer of knowledge dilakukan secara graduasi.

Sedangkan saran yang bisa diberikan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat melalui proses pembangunan fasilitas Infrastruktur permukiman Kampung Kota;

- Dalam membangun masyarakat marjinal mutlak harus dengan cara melibatkan mereka dalam seluruh proses pembangunan di wilayah Kampung Kota agar masyarakat dapat lebih mandiri untuk mengembangkan kualitas lingkungan di daerahnya.
- Penelitian yang telah dilakukan ini sangat bermanfaat untuk memberikan rasa hormat dan penghargaan yang lebih pada kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah di kampung kota

Bibliography

- Asian Coalition for Housing Rights. *Housing by People in Asia*, October 2003, No. 15
- Bawole, Paulus, (2016). "Marginalized Architecture as An Identity of Urban Growth in Big Cities" in Proceedings International Conference: *Manifestations of Architecture in Indonesia*, Department of Architecture, ITS, Surabaya-

-
- Gehl, Jan. (2010). *City for People*. Island Press, Connecticut Ave., NW, Suite 300, Washington, DC
- Hasan, Arif; Patel, Sheela; Satterthwaite, David. (2005). How To Meet The Millenium Development Goals (MDGS) in Urban Areas," *Environment & Urbanization*," *Vo. 17 No. 1, April 2005*. s. 3- 19
- Munt, Richard.(Retrieved 21st September 2008), "Building Community Participation". <http://www.aifs.gov.au/sf/pubs/bull2/rm.html>
- Nierman, Manfred. (2005). *Armutbekämpfung in Städten*. GTZ GmbH, Eschbor
- Reid, J. Norman. (2000). *Community Participation*. U.S. Department of Agriculture. Washington,
- Srinivas, Hari. (2018). "Defining Squatter Settlements." The Global Development Research Center . 19 Dec. 2018 (<http://www.gdrc.org/uem/define-squatter.html>)
- UN Habitat. (2014). Practical Guide to Designing, Planning, and Implementing Citywide Slum Upgrading Programs, United Nation Human Settlement Programme, Nairobi.